

BAB I

PENDAHULUAN

1.1. Latar Belakang Masalah

Akuntabilitas menurut Lawton (2004) berfungsi untuk sebuah proses seseorang atau sekelompok orang yang diperlukan untuk membuat laporan aktivitas mereka dengan cara yang sudah atau belum diketahui untuk melaksanakan pekerjaan mereka. Akuntabilitas sebagai salah satu prinsip *good corporate governance* berkaitan dengan pertanggungjawaban pimpinan atas keputusan yang hasil yang dicapai, sesuai dengan wewenang yang dilimpahkan dalam pelaksanaan pertanggungjawaban mengelola organisasi. Menurut Undang-undang Nomor 32 tahun 2004 tentang hak, wewenang, dan kewajiban untuk melaksanakan dan menyelenggarakan urusan pemerintah daerah yang lebih efisien, efektif, serta bertanggungjawab. Atas berlakunya peraturan Undang-undang Nomor 32 tahun 2004 tersebut, maka pemerintah daerah harus dapat meningkatkan akuntabilitas atas pengelolaan keuangannya yakni untuk mewujudkan semua informasi penyajian laporan keuangan secara jujur dan terbuka kepada publik, karena kegiatan pemerintah dalam rangka melaksanakan amanah rakyat.

Akuntabilitas yang baik, akan mengurangi adanya tindak kecurangan di suatu instansi. Dengan adanya pertanggungjawaban, maka pihak-pihak yang diberi amanah akan lebih merasa takut melakukan tindakan kecurangan. Setidaknya tindakan kecurangan pada instansi yang memiliki akuntabilitas yang baik dapat

lebih diminimalisir jika dibandingkan dengan instansi yang bahkan tidak memiliki akuntabilitas yang memadai.

Dalam pengelolaan keuangan seharusnya mengacu kepada Peraturan Pemerintah No. 58 tahun 2005 tentang Pengelolaan Keuangan Daerah dan Permendagri No.13 tahun 2006 yang telah diperbaharui dengan Permendagri No. 59 Tahun 2007 tentang pedoman pengelolaan keuangan daerah, mulai dari penyusunan anggaran, pelaksanaan anggaran sampai pertanggungjawaban penggunaan anggaran daerah. Sedangkan penyajian laporan keuangan pemerintah daerah harus mengacu kepada Peraturan Pemerintah No.24 tahun 2005 tentang Standar Akuntansi Pemerintah yang telah diperbaharui dengan Peraturan Pemerintah No. 71 tahun 2010 tentang Standar Akuntansi Pemerintah.

Menurut Wahida (2015) Laporan keuangan yang disajikan oleh pemerintah harus mengandung informasi yang relevan, jujur dan terbuka kepada masyarakat. Salah satu alat untuk memfasilitasi supaya terciptanya akuntabilitas publik adalah melalui penyajian laporan keuangan pemerintah daerah. Laporan keuangan merupakan komponen penting untuk menciptakan akuntabilitas sektor publik dan merupakan salah satu alat ukur kinerja finansial pemerintah daerah. Laporan keuangan pemerintah kemudian disampaikan kepada DPR/DPRD dan masyarakat umum setelah diaudit oleh Badan Pemeriksa Keuangan (BPK).

Komponen penyajian laporan keuangan menurut PP No. 24 tahun 2005 terdiri dari, Laporan Realisasi Anggaran, Neraca , Laporan Arus Kas dan Catatan atas Laporan Keuangan. Kemudian direvisi menjadi PP No. 71 tahun 2010 yaitu penyajian laporan keuangan terdiri atas Laporan Realisasi Anggaran, Laporan

Perubahan atas Saldo Anggaran Lebih, Neraca, Laporan Arus Kas, Laporan Operasional, Laporan Perubahan Ekuitas dan Catatan Atas Laporan Keuangan. Pemerintah daerah harus bisa menyusun laporan keuangan sesuai standar akuntansi yang diterima umum dan memenuhi karakteristik kualitatif laporan keuangan. Karakteristik kualitatif informasi dalam Kerangka Konseptual Akuntansi Pemerintahan antara lain : relevan, andal, dapat dipahami, dan dapat dibandingkan.

Adapun upaya untuk perbaikan di bidang penyajian pelaporan keuangan daerah ini nampaknya belum dapat dilaksanakan sepenuhnya oleh pemerintah daerah. Kondisi tersebut dapat di lihat di jajaran Satuan Kerja Perangkat Daerah (SKPD) pada lingkungan pemerintah daerah. Perubahan pendekatan akuntansi pemerintah daerah dari *single entry* menuju *double entry* merupakan perubahan yang cukup revolusioner. Di sisi lain juga publikasi laporan keuangan oleh pemerintah daerah melalui surat kabar, internet, atau cara lain nampaknya belum menjadi hal yang umum bagi sebagian daerah (Aliyah, 2012). Semakin baik penyajian laporan keuangan pemerintah daerah maka akan berimplikasi terhadap peningkatan terwujudnya akuntabilitas pengelolaan keuangan daerah. Seperti hasil penelitian yang dilakukan oleh Nasution (2009) yang menyatakan penyajian laporan keuangan berpengaruh terhadap akuntabilitas pengelolaan keuangan daerah,

Aksesibilitas menurut perspektif tata ruang adalah keadaan atau ketersediaan hubungan dari suatu tempat ketempat lainnya atau kemudahan seseorang atau kendaraan untuk bergerak dari suatu tempat ketempat lain dengan aman, nyaman,

serta kecepatan yang wajar (Koestoer, 2002). Aksesibilitas dalam laporan keuangan merupakan kemudahan bagi seseorang untuk memperoleh informasi mengenai laporan keuangan. Akuntabilitas yang efektif tergantung kepada akses publik terhadap laporan keuangan yang dapat dibaca dan dipahami (Mulyana, 2006). Masyarakat sebagai pihak yang memberi kepercayaan kepada pemerintah untuk mengelola keuangan publik berhak untuk mendapat informasi keuangan pemerintah untuk mengelola keuangan pemerintah untuk melakukan evaluasi terhadap pemerintah (Mardiasmo, 2002). Dalam demokrasi yang terbuka, akses ini diberikan oleh media, seperti surat kabar, majalah, radio, stasiun televisi, dan *website* (internet), dan forum yang memberikan perhatian langsung atau peranan yang mendorong akuntabilitas pemerintah terhadap masyarakat (Shende, 2004).

Terdapat beberapa penelitian terdahulu yang meneliti tentang akuntabilitas pengelolaan keuangan daerah. Penelitian Mustofa (2012) menunjukkan bahwa penyajian laporan keuangan daerah dan aksesibilitas laporan keuangan secara bersama-sama berpengaruh dan signifikan terhadap akuntabilitas pengelolaan keuangan daerah.

Sedangkan penelitian oleh Wahyuni (2014) menunjukkan pengaruh signifikan dan positif secara parsial dan simultan pengaruh penyajian laporan keuangan dan aksesibilitas laporan keuangan daerah terhadap akuntabilitas pengelolaan keuangan daerah. Dan diperkuat lagi oleh penelitian Sande (2013) penelitian ini menunjukkan bahwa Penyajian laporan keuangan dan aksesibilitas laporan keuangan berpengaruh signifikan positif terhadap akuntabilitas pengelolaan keuangan daerah.

Dari penelitian penelitian diatas, penelitian ini memodifikasi dari penelitian Mustofa (2012), Wahyuni (2014) dan Sande (2013). Penelitian ini mengambil Objek di DPRD dan LSM kabupaten Jepara, Sedangkan pada penelitian sebelumnya adalah pegawai pada Satuan Kerja Perangkat Daerah (SKPD) diluar Kabupaten Jepara. Sebagai alasan Pemilihan penelitian di wilayah Kabupaten Jepara dikarenakan peneliti ingin mengetahui seberapa besar masyarakat mampu membaca dan memahami laporan keuangan pemerintah daerah (LKPD) kabupaten Jepara. Berdasarkan latar belakang yang dijelaskan di atas, maka penulis tertarik untuk melakukan penelitian dengan judul : **“Pengaruh Penyajian Laporan Keuangan Daerah dan Aksesibilitas Laporan Keuangan Daerah Terhadap Akuntabilitas Pengelolaan Keuangan Daerah Kabupaten Jepara”**.

1.2.Ruang Lingkup Penelitian

Ruang lingkup penelitian ini diperoleh dengan pengguna eksternal laporan keuangan (pihak-pihak yang berkepentingan terhadap laporan keuangan) pemerintah kabupaten Jepara, dalam hal ini yang dituju oleh peneliti adalah Anggota DPRD dan LSM di wilayah kabupaten Jepara dengan melalui penyebaran kuesioner. Dalam penelitian ini yang menjadi variabel *independen* (bebas) yaitu penyajian laporan keuangan dan aksesibilitas laporan keuangan. Sedangkan variabel *dependen* (terikat) dalam penelitian ini adalah akuntabilitas pengelolaan keuangan daerah .

1.3.Rumusan Masalah

Perumusan masalah adalah penjelasan mengenai alasan mengapa masalah yang dikemukakan dalam penelitian itu dipandang menarik, penting dan perlu untuk diteliti. Dari uraian latar belakang diatas tersebut maka rumusan masalah dalam penelitian ini adalah :

1. Apakah penyajian laporan keuangan berpengaruh terhadap akuntabilitas pengelolaan keuangan daerah Kabupaten Jepara ?
2. Apakah aksesibilitas laporan keuangan berpengaruh terhadap akuntabilitas pengelolaan keuangan daerah Kabupaten Jepara ?
3. Apakah penyajian laporan keuangan dan aksesibilitas laporan keuangan berpengaruh secara simultan terhadap akuntabilitas pengelolaan keuangan daerah Kabupaten Jepara ?

1.4.Tujuan Penelitian

Berdasarkan identifikasi permasalahan yang tertuang dalam rumusan masalah, adapun tujuan dari penelitian ini adalah:

1. Untuk menganalisis seberapa besar pengaruh penyajian laporan keuangan terhadap akuntabilitas pengelolaan keuangan daerah Kabupaten Jepara
2. Untuk menganalisis seberapa besar pengaruh aksesibilitas laporan keuangan terhadap akuntabilitas pengelolaan keuangan daerah kabupaten Jepara

3. Untuk menganalisis seberapa besar pengaruh penyajian laporan keuangan dan aksesibilitas laporan keuangan secara simultan terhadap akuntabilitas pengelolaan keuangan daerah kabupaten Jepara

1.5. Manfaat Penelitian

Adapun kegunaan dari penelitian ini sebagai berikut :

1. Bagi penulis, penelitian ini merupakan sarana untuk menambah pengetahuan mengenai sistem pengelolaan keuangan daerah terutama berkaitan dengan pengelolaan keuangan serta penyajian laporan keuangan daerah.
2. Bagi pemerintah daerah kabupaten Jepara yang menjadi lokasi penelitian, penelitian ini diharapkan mampu memberi referensi dalam hal penyajian laporan keuangan dan aksesibilitas laporan keuangan dalam rangka peningkatan akuntabilitas pengelolaan keuangan daerah.
3. Bagi perguruan tinggi UNISNU Jepara, penelitian ini diharapkan dapat digunakan sebagai bahan referensi dalam pengembangan ilmu pengetahuan di bidang akuntansi sektor publik.
4. Bagi masyarakat atau publik, penelitian ini dapat digunakan sebagai bahan informasi mengenai sejauh mana akuntabilitas pengelolaan keuangan Kabupaten Jepara.

1.6. Sistematika Penulisan

Dalam penyusunan skripsi ini, penulis membuat sistematika penulisan sesuai dengan ketentuan yang telah ditetapkan guna memudahkan pembaca

dalam menelaah bidang kajian yang termuat pada penulisan skripsi ini. Adapun sistematika penulisan adalah sebagai berikut :

BAB I : PENDAHULUAN

Pendahuluan merupakan bagian isi yang memaparkan tentang latar belakang masalah yang diteliti, rumusan masalah, ruang lingkup masalah, tujuan penelitian, manfaat dari penelitian, serta sistematika penulisan skripsi.

BAB II : TINJAUAN PUSTAKA

Bab ini berisi landasan teori dan bahasan penelitian-penelitian sebelumnya yang sesuai dengan masalah yang diteliti, sehingga dapat digunakan sebagai acuan dalam membuat kerangka penelitian teoritis dan perumusan hipotesis.

BAB III : METODE PENELITIAN

Dalam bab ini akan memaparkan tentang pelaksanaan penelitian yang berisi informasi mengenai variabel-variabel yang diteliti beserta definisi operasionalnya, populasi dan penentuan sampel, metode pengumpulan data, metode pengolahan data, serta metode analisis data.

BAB IV : HASIL PENELITIAN DAN PEMBAHASAN

Bab ini akan memaparkan tentang hasil penelitian atas interpretasi dari output pengolahan data dengan menggunakan SPSS yang terdiri dari hasil analisis uji asumsi klasik, analisa dari persamaan

regresi yang dihasilkan, serta jawaban atas hipotesis yang diajukan pada bab sebelumnya.

BAB V : PENUTUP

Bab ini merupakan bagian akhir atau penutup dari penulisan skripsi yang berisi kesimpulan dan saran yang merupakan hasil pemikiran penulis atas analisis yang telah dilakukan terkait dengan penelitian.

DAFTAR PUSTAKA

Merupakan daftar lengkap yang memuat segala sumber informasi yang diperlukan dalam penyusunan skripsi, yang dikutip dalam bentuk teori, pendapat ilmiah dari penelitian terdahulu.

LAMPIRAN

Lampiran yang disajikan dalam penyusunan skripsi ini merupakan hal-hal yang dianggap perlu dan mendukung proses penyusunan skripsi ini.